



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**Pelaksanaan Program Raskin (Studi Kasus Penyaluran di
Kelurahan Adiarsa Barat)**

Skripsi

Oleh

Lidia Novianti

2012310011

Bandung

2017

No. Knds	: AP NOV P/17
Tanggal	: 3 April 2017
No. Ind	: 7642 - FISIP / SKP 33832
Divisi	:
Mudiah / Galt	:
Oral	: FISIP



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**Pelaksanaan Program Raskin (Studi Kasus Penyaluran di
Kelurahan Adiarsa Barat)**

Skripsi

Oleh

Lidia Novianti

2012310011

Pembimbing

Deny M. Tri Aryadi, Drs., M.Si

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Lidia Novianti
Nomor Pokok : 2012310011
Judul : Pelaksanaan Program Raskin (Studi Kasus Penyaluran di Kelurahan
Adiarsa Barat)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 12 Januari 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si

Sekretaris

Deny M. Tri Aryadi, Drs., M.Si

Anggota

Hubertus Hasan I., Drs., M.Si

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

Pernyataan



Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lidia Novianti
NPM : 2012310011
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin (Studi Kasus Penyaluran di Kelurahan Adiarsa Barat)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 20 Januari 2017



Lidia Novianti



Abstrak

Nama : Lidia Novianti
NPM : 2012310011
Judul : “Pelaksanaan Program Raskin (Studi Kasus
Penyaluran di Kelurahan Adiarsa Barat”

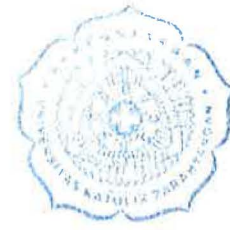
Judul penelitian ini adalah Pelaksanaan Program Raskin (Studi Kasus Penyaluran di Kelurahan Adiarsa Barat). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyaluran raskin di Kelurahan Adiarsa Barat. Penelitian ini berguna untuk memberikan perbaikan pelaksanaan program raskin kedepannya, berkaitan dengan permasalahan program raskin yang lebih banyak berada pada seputar pelaksanaan penyaluran. Penelitian ini menggunakan teori Stufflebeam, dengan menggunakan empat komponen yaitu: konteks, masukan, proses, dan hasil.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian naratif. Peneliti dalam memahami pelaksanaan penyaluran raskin lebih membutuhkan cerita dan pendapat dari narasumber secara mendalam. Berkaitan juga dengan bagaimana kronologi penyaluran raskin yang terlaksana di Kelurahan Adiarsa Barat. Maka dari itu, peneliti menggunakan pendekatan naratif sebagai metode penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara mendalam dengan pihak yang berkaitan dengan penyaluran raskin yaitu pihak kelurahan, Perum Bulog, serta RTS-PM yang menjadi kelompok sasaran program. Untuk mengecek keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber dan kemudian hasil analisis berupa narasi untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai penyaluran raskin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran raskin di Kelurahan Adiarsa Barat masih kurang terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dari komponen hasil yang belum sepenuhnya mencapai tujuan program. Penyaluran raskin di Kelurahan Adiarsa Barat tidak tepat jumlah dan tidak tepat harga. Saran dari hasil penelitian adalah mengenai koordinasi antara RW/RT dengan kelurahan, dimana Musyawarah Kelurahan harus dijalankan, tidak hanya tertulis.

Kata kunci: Evaluasi Program, Program Raskin, Penyaluran Raskin



Abstract

Nama : Lidia Novianti
NPM : 2012310011
Title : “Program Raskin Implementation (Case Study Distribution in Kelurahan Adiarsa Barat)”

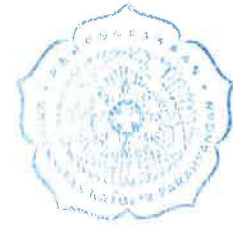
The title of this research is the Program Raskin Implementation (Case Study Distribution in Kelurahan Adiarsa Barat. This study aims to determine how the raskin distribution in Kelurahan Adiarsa Barat. This research is useful to give a decision on the future program improvement, Raskin program related to the issue that more are in surrounding the implementation of distribution. This study uses the theory Stufflebeam, using four evaluation components, namely: context, input, process, and outcome.

The method used is the narrative research. Researchers in understanding the channeling Raskin need more stories and opinions of informants in depth. Is also related to how the distribution chronology Raskin accomplished in Kelurahan Adiarsa Barat. Therefore, the researchers used a narrative approach as a method of research.

This study uses data collection techniques through the study of documents, observation, and interviews with parties associated with the distribution of Raskin is kelurahan, Bulog, and the RTS-PM is the target group of the program. To check the validity of the data the researcher uses triangulation source and then the analysis results in the form of a narrative to get a picture in depth about the distribution of Raskin.

The results showed that the distribution of Raskin in Kelurahan Adiarsa Barat still not performing well. This is evidenced from the component results do not fully meet the program objectives. Distribution of Raskin in Kelurahan Adiarsa Barat he program goals. Which is Distribution of Raskin in Kelurahan Adiarsa Barat imprecise quantity and inappropriately priced. Suggestions from the research is the coordination between RW / RT with kelurahan, where the Musyawarah Kelurahan should run, not just in writing.

Keywords: *Evaluation Program, Raskin Program, Distribution of Raskin*



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan karunianya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin (Studi kasus Penyaluran di Kelurahan Adiarsa Barat)”. Skripsi ini merupakan penelitian ilmiah untuk memenuhi syarat akhir dalam mencapai gelar Sarjana dengan jenjang pendidikan Strata Satu Program Studi Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Skripsi ini merupakan penelitian tentang bagaimana pelaksanaan program raskin khususnya penyaluran di Kelurahan Adiarsa Barat. Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk menjawab keingintahuan penulis terkait dengan penyaluran raskin. manfaat dari skripsi ini tentu untuk memperkaya pengetahuan penulis di sektor Administrasi Publik, manfaat lainnya yaitu sebagai karya ilmiah yang dapat berguna bagi siapa saja yang membutuhkan, serta dapat memberikan salah satu bahan masukan bagi semua pihak terkait dengan proses pelaksanaan program raskin khususnya penyaluran. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang dapat membantu menyempurnakan skripsi ini dan tentunya dapat mengembangkan kemampuan serta pengetahuan penulis terkait dengan administrasi publik di kemudian hari.

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas segala karunia yang diberikan kepada penuli, kepada kedua orang tua penulis Ir. H. Endang Akhmad Ramali dan Dra. Hj. Nurdiana Cahyaningrum, MM., kakak saya Rani Meliani, SE., adik saya Akhmad Ilham Radinata dan Akhmad Iqbal Rahmadi serta keluarga besar lainnya yang menjadi motivasi terbesar kepada peneliti untuk menyelesaikan tugas pendidikan dengan sebaik-baiknya. Tak lupa penulis sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih untuk dosen pembimbing peneliti Deny M. Tri Aryadi, Drs., M.Si yang sudah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Pius Sugeng Prasetyo, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
2. Tutik Rachmawati, S.IP., MA, dan Kristiawan Widya Wicaksono, S.Sos. M.Si. selaku Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.
3. Segenap dosen pengajar, staf pelaksana, serta seluruh keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeritas Katolik Parahyangan.
4. Segenap narasumber terkait dengan penelitian ini, yang telah memberikan informasi terkait untuk menjawab pertanyaan penelitian.

5. Rekan seperjuangan dalam penulisan skripsi ini, Disya, Devi, Dinna, Chyntia, dan Axell.

6. Sahabat yang senantiasa meluangkan waktunya dan menemani penulis di masa-masa kuliah, Rika, Risya, Aulia, dan Priska.

7. Teman dan keluarga besar Administrasi Publik dan FISIP UNPAR.

8. Semua pihak yang turut membantu, dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan semua pihak kepada penulis. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Bandung, 20 Januari 2017

Penulis,

Lidia Novianti



DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Abstract.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	17
1.3 Tujuan Penelitian.....	18
1.4 Kegunaan Penelitian.....	18
BAB II KERANGKA BERPIKIR.....	20
2.1 Pengertian Ilmu Administrasi Publik.....	19
2.2 Model Evaluasi CIPP Stufflebeam.....	23
2.2.1 Komponen Evaluasi CIPP Stufflebeam.....	25
2.3 Pengertian Program Raskin.....	30
2.3.1 Peran Perum Bulog.....	32
2.3.2 Peran Pemerintah dalam Penyaluran Raskin.....	33
2.3.3 Mekanisme Penyaluran Raskin.....	35

2.4 Model Penelitian Pelaksanaan Program Raskin (Studi Kasus Penyaluran Raskin di Kelurahan Adiarsa Barat.....	41
2.5 Penjelasan Model Penelitian.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	49
3.1 Jenis Penelitian.....	49
3.2 Peran Penulis.....	50
3.3 Lokasi Penelitian.....	50
3.4 Sumber Data.....	50
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.6 Validitas Data.....	53
3.7 Analisis Data	54
BAB IV KARAKTERISTIK KELURAHAN ADIARSA BARAT	56
4.1 Data Wilayah Kelurahan Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat	
Kabupaten Karawang.....	56
4.1.1 Topografi.....	56
4.1.2 Demografi	57
4.1.3 Pemerintahan Kelurahan.....	58
4.1.4 Kependudukan	59
4.1.4.1 Usia	59
4.1.4.2 Pendidikan.....	60
4.1.4.3 Tenaga Kerja.....	61

4.1.5 Sarana dan Prasarana	61
4.2 Program Raskin.....	62
4.2.1 Mekanisme Penyaluran Raskin.....	63
4.3 Profil Program Raskin Kelurahan Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat	
Kabupaten Karawang.....	67
4.3.1 Penetapan Titik Distribusi.....	72
4.3.2 Penetapan Data Penerima Raskin	68
BAB V PELAKSANAAN PENYALURAN RASKIN DI KELURAHAN	
ADIARSA BARAT	71
5.1 Konteks Pelaksanaan Penyaluran Raskin di Kelurahan Adiarsa Barat	71
5.1.1 Sasaran Program Raskin	71
5.1.2 Jatah Raskin	75
5.1.3 Kualitas Raskin	77
5.2 Masukan Pelaksanaan Penyaluran Raskin di Kelurahan Adiarsa Barat	79
5.2.1 Sosialisasi dan Monitoring.....	80
5.2.2 Sarana dan Prasarana	88
5.2.3 Sumber Dana.....	91
5.3 Proses Pelaksanaan Penyaluran Raskin di Kelurahan Adiarsa Barat	94
5.3.1 Waktu Pelaksanaan	94
5.3.2 Tempat Pelaksanaan.....	97
5.3.3 Pelaksanaan Kegiatan	101

5.4 Hasil Pelaksanaan Penyaluran Raskin di Kelurahan Adiarsa Barat	116
5.4.1 Tercapainya Indikator 6 Tepat Pelaksanaan Program Raskin	116
5.4.2 Tujuan Umum Program Raskin	128
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	134
6.1 Simpulan	134
6.2 Saran	140
DAFTAR PUSTAKA	143
LAMPIRAN.....	146



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Jumlah Pagu Nasional Program Raskin 2016.....	4
Tabel 1.2	: Jumlah RTS-PM di wilayah kerja Perum Bulog Sub Divre Karawang	10
Tabel 1	: Jumlah Pagu Raskin di Kecamatan Karawang Barat	12
Tabel 2.1	: Tujuan, Metode, dan Hubungannya dengan Pembuatan Keputusan	28
Tabel 4.1	: Jumlah Jenis Kelamin Penduduk Kelurahan Adiarsa Barat	59
Tabel 4.2	: Usia Penduduk Kelurahan Adiarsa Bar	59
Tabel 4.3	: Pendidikan Penduduk Kelurahan Adiarsa Barat.....	60
Tabel 4.4	: Tenaga Kerja Penduduk Kelurahan Adiarsa Barat.....	61
Tabel 4.5	: Daftar Tim Koordinasi Raskin Tahun 2016 di Kelurahan Adiarsa Barat	67
Tabel 4.6	: Penerima dan Penandatanganan BAST Raskin Kelurahan Adiarsa Barat	68
Tabel 4.7	: Jumlah RTS-PM di Kelurahan Adiarsa Barat	69
Tabel 5.1	: Daftar Tim Koordinasi Raskin Tahun 2016 di Kelurahan Adiarsa Barat	98
Tabel 5.2	: Titik Bagi di Kelurahan Adiarsa Barat	100



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	: Alur Penyaluran Raskin	40
Gambar 2.2	: Model Penelitian Pelaksanaan Program Raskin (Studi Kasus Penyaluran di Kelurahan Adiarsa Barat).....	41
Gambar 4.1	: Struktur Pemerintahan Kelurahan Adiarsa Barat.....	58
Gambar 5.1	: Foto Kualitas Raskin di Kelurahan Adiarsa Barat.....	78
Gambar 5.2	: Foto Gudang Perum Bulog	88
Gambar 5.3	: Foto Kuitansi Biaya Angkut Pendistribusian.....	92
Gambar 5.4	: Foto Pendistribusian Raskin di Kelurahan Adiarsa Barat.....	109
Gambar 5.5	: Foto Daftar Lokasi Titik Bagi Kelurahan Adiasra Barat	112



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Transkrip Interview Guide
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Melakukan Penelitian di Kelurahan Adiarsa Barat
- Lampiran 3 : Berita Acara Musyawarah Kelurahan Adiarsa Barat
- Lampiran 4 : Realisasi dan Penunggakan Penyaluran Raskin Kelurahan Adiarsa Barat Maret-Juli 2016
- Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Raskin adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan. Program ini berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan). Program yang telah berjalan selama 16 tahun ini tentunya telah memberikan dampak yang besar terhadap stabilitas ketahanan pangan Indonesia dengan jangka panjang. Namun sampai dengan sekarang jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) masih cukup banyak. Sehingga masih menjadi prioritas utama dalam Rencana Kerja Pemerintah 2011¹

Berdasarkan Pedum Raskin 2016, program ini memiliki tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Selain itu program juga bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulan kemiskinan. Jika diterima secara utuh, ketetapan alokasi pagu raskin saat ini per kepala rumah tangga yaitu 15 kg beras per bulan akan dapat mengurangi kemiskinan sekitar 1,22% atau sekitar 2,69 jiwa (P4S, Bappenas, 2013)² Dalam memenuhi kebutuhan pangan, program raskin perlu didukung agar masyarakat miskin benar-benar bisa

¹ Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah

² Tujuan Program Raskin, diakses di <http://www.raskin.web.id/> pada tanggal 17 september 2015 pukul 20.05

merasakan manfaatnya, yakni dapat membeli beras berkualitas baik dengan harga terjangkau. Sebagai program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, efektivitas Program Raskin sangat bergantung pada kecukupan nilai transfer pendapatan dan ketepatan sasaran kepada kelompok miskin dan rentan³

Dalam rangka pelaksanaan program raskin perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antara K/L terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif.⁴ Sebagai implementasinya maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin di Pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan/pemerintah setingkat. Keberhasilan program raskin ini ditentukan oleh kinerja seluruh pemangku kepentingan pelaksanaan program raskin tersebut. Oleh karenanya, pelaksanaan program yang dijalankan *stakeholders* harus sesuai dengan Pedoman Umum Raskin atau Pedum Raskin.

Implementasi Program Raskin dari tahun ketahun dicapai melalui koordinasi antar pemerintah dan K/L terkait baik di tingkat pusat maupun daerah. Koordinasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, dengan mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat. Program Raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden mengenai kebijakan perberasan nasional yaitu Inpres No. 5 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya

³ Pedum RASKIN 2016.pdf, page 23

⁴ Bab 3: engelolaan dan Pengorganisasian. Pedum RASKIN 2016.pdf, page 14

peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional.

Secara khusus pemerintah menginstruksikan kepada Perum BULOG yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG, dalam hal menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi (raskin) bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Saat ini Harga Tebus Raskin (HTR) yaitu Rp. 1600/kg dan masing-masing RTS-PM memiliki hak sebanyak 15kg raskin per bulannya. RTS-PM ialah Rumah Tangga sasaran Penerima Manfaat yang telah terdaftar sebagai penerima raskin.

Pemerintah Pusat berperan dalam membuat kebijakan program. Sedangkan pelaksanaan penyaluran raskin sangat tergantung kepada Pemerintah Daerah dan Perum BULOG untuk menyampaikan beras kepada RTS-PM. Oleh karena itu, peran Perum BULOG sebagai penanggungjawab pengadaan dan penyaluran raskin dan juga Pemerintah Daerah sebagai penyaluran raskin untuk sampai ke tangan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sangat penting dalam peningkatan efektifitas Program Raskin. Program ini dilaksanakan di bawah tanggung jawab Departemen Dalam Negeri dan Perum Bulog sesuai dengan SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum Bulog Nomor : 25 Tahun 2003 dan Nomor : PKK-12/07/2003, yang melibatkan instansi terkait, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Program raskin pada pelaksanaannya bersandar pada Pedoman Umum (Pedum) Raskin, dimana

merupakan acuan koordinasi bagi para pelaksana program di pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.

Tabel 1.1 Jumlah Pagu Nasional Program Raskin 2016

RTM Sasaran	15.530.897 RTM
Pagu setahun	2.795.561 Ton
Realisasi	407.243 Ton
RTM Penerima	15.530.897 RTM

(sumber: www.bulog.co.id)

Dengan luasnya wilayah kerja implemementasi program yang mencakup seluruh bagian di Indonesia dengan keterlibatan seluruh peran pemerintah dan isntansi/lembaga negara memberikan corak pada pelaksanaan program yang tentunya memunculkan berbagai macam permasalahan yang berbeda-beda di tiap wilayahnya. Pemerintah pusat telah mengambil berbagai kebijakan untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi yang berkembang, misalnya penyesuaian jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang didasarkan dari data jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) menurut BPS, alokasi jumlah beras untuk setiap RTS-PM (kuantum Raskin), dan penyesuaian Harga Tebus Raskin di Titik Distribusi (TD) dari Rp 1.000,-/kg menjadi Rp 1.600,-/kg.

Kebijakan Perberasan Nasional yang tertuang dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras

Oleh Pemerintah tanggal 7 maret 2015 mencakup antara lain 3 tugas pokok Pelayanan Publik Perum BULOG, yaitu :

- a. Melaksanakan kebijakan pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP)
- b. Menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang diwujudkan dalam pelaksanaan Program Raskin.
- c. Serta menyediakan dan menyalurkan beras untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana, dan rawan pangan.

Ketiga tugas publik BULOG tersebut saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain sehingga dapat mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga maupun nasional yang lebih kokoh. Dalam penelitian ini, hanya membahas peran Perum Bulog ke dua, yaitu penyaluran raskin yang diwujudkan dalam pelaksanaan Program Raskin. Pelaksanaan penyaluran raskin yang dilakukan oleh Perum BULOG adalah pendistribusian dari Gudang BULOG sampai Titik Distribusi (TD) di seluruh Indonesia. Sedangkan Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam penyaluran RASKIN dari TD sampai kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Sasaran (RTS-PM). Dukungan yang diperlukan dari pemerintah daerah minimal pengalokasian APBD untuk angkutan beras dari TD sampai ke RTS-PM.

Raskin disalurkan oleh Perum BULOG ke Titik Distribusi (TD) yaitu lokasi yang ditentukan dan disepakati oleh Perum BULOG dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Biasanya Titik Distribusi berada di tingkat kelurahan/desa. Pemerintah yang menjadi Titik Distribusi bertanggungjawab menyalurkan raskin

dari TD ke Titik Bagi (TB), yaitu lokasi tempat penyerahan raskin kepada para RTS-PM yang menebusnya. Titik Bagi (TB) merupakan tempat penyaluran langsung beras ke tangan rumah tangga. Umumnya, TB ada di tingkat desa atau RW atau RT. Cara memastikan RTS-PM mendapatkan haknya sebanyak 15kg raskin perbulan bisa menggunakan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM).

Perum Bulog Sub Divre Karawang menaungi Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi. Memiliki jumlah total 10 gudang yang tersebar untuk penyimpanan beras yang akan disalurkan kepada tiga wilayah kerja Sub Divre Karawang tersebut. Kelancaran pelaksanaan penyaluran yang di hadapi di lapangan bersifat variatif untuk mencapai indikator 6 Tepat , Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Kualitas, Tepat Waktu, Tepat Harga, dan Tepat Administrasi. Proses pelaksanaan penyaluran tidak lepas dari berbagai permasalahan dengan luasnya ruang lingkup kerja pemerintah dan lembaga terkait.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan pelaksanaan program penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah belum sepenuhnya efektif karena data penerima yang tidak mutakhir dan kualitas beras yang meragukan.⁵ Dimana salah satu penyebabnya karena mekanisme pengujian kualitas beras raskin belum jelas akibatnya terjadi pengembalian raskin ke Perum Bulog karena kualitas beras yang diterima tidak baik, seperti karena beras berwarna hitam, berkutu, banyak bubuk dan berbau apek. Atas pemeriksaan

⁵ CNN Indonesia; BPK: Ada Risiko Penyimpangan Subsidi Raskin di Bulog. Rabu, 29/04/2015 11:13 WIB Diakses di <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150429111318-78-49982/bpk-ada-risiko-penyimpangan-subsidi-raskin-di-bulog/>

kinerja pengelolaan raskin yang dilakukan BPK tersebut, pihaknya menginstruksikan Tim Koordinasi Raskin di tingkat pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan Perum Bulog agar menetapkan dan menyepakati mekanisme pengujian raskin pada saat penyaluran. Karena hal tersebut dapat mengakibatkan risiko penyimpangan atas pembayaran subsidi raskin oleh pemerintah kepada Perum Bulog.

Masalah kualitas beras yang sampai kepada RTS-PM tidak selalu memenuhi standar kualitas, hal ini menyebabkan komplainnya para RTS ke Perum Bulog soal kualitas beras yang didistribusikan Perum Bulog dari gudang ke Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan. Warga Desa Setiadarma, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengeluhkan terkait beras miskin (raskin) yang berkualitas buruk sehingga banyak warga yang tidak mengambilnya.⁶ *"Saya juga bingung dengan kondisi beras raskin saat ini. Dalam pengantarannya pun memang tidak bisa dilihat langsung kualitas berasnya. Lantaran, pengiriman berasnya dilakukan malam hari,"* Dalam berita media tersebut, Kepala Bulog Karawang, Abdul Basit, menanggapi hal tersebut, ia membantah jika kualitas raskin selalu buruk, dan terkesan tidak layak konsumsi. *"Kalau untuk raskin kan semua stok pasti dikeluarkan, tapi tergantung data. Yang mana masuk duluan akan dikeluarkan ke wilayah Bekasi,"* katanya. Ia menambahkan bila ada warga yang menerima beras dengan kualitas tidak layak, maka untuk bersikap kooperatif melaporkan kepada kantor Bulog setempat dan akan dilakukan penggantian.

⁶ AntaraNews; Warga Kabupaten Bekasi Keluhkan Kualitas Raskin. Selasa, 6 September 2016 11:27 WIB. Diakses di <http://megapolitan.antaraneews.com/berita/23949/warga-kabupaten-bekasi-keluhkan-kualitas-raskin>

Ketercapaian pelaksanaan program raskin tidak luput dari beberapa kendala di lapangan, pada umumnya terjadi karena⁷

1. terbatasnya alat atau sarana angkutan JPL, yang menyebabkan keterlambatan penyaluran raskin ke Titik Distribusi
2. adanya penundaan pembayaran/pelunasan HTR (Harga Tebus Raskin) ke rekening Perum Bulog, sehingga mengakibatkan tertundanya pendistribusian raskin bulan berikutnya karena terjadi penunggakan pembayaran di bulan sebelumnya.
3. kualitas beras, ketidaktepatan dalam pengecekan beras sehingga warga protes dan meminta penukaran beras yang telah diterima oleh pemerintah desa ke Perum Bulog

Pada proses penyaluran raskin, menyangkut pada ketersediaan alat dan sarana serta pendampingan yang menunjang kelancaran proses pembagian raskin ke Titik Distribusi yang umumnya berada ditingkat kelurahan/desa, pada faktanya masih terjadi keterlambatan penyaluran raskin dikarenakan jumlah angkutan dan jumlah pendistribusian tidak sebanding.⁸

“Jadi pada saat pengiriman banyak, dalam satu hari pengiriman itu bisa mencapai 450 ton, sedangkan kapasitas angkut hanya 350 ton. Jadi truk harus bolak-balik untuk mengirim sisa beras yang belum tersalurkan, efeknya ke pengiriman yang sampai ke desanya terlalu sore, sedangkan jam kerja kelurahan kan sampai jam 4, kadang beras sampai ke desanya malam juga.. sering dapet protes juga sering ditelfon karena jam 3 belum sampai..”

⁷ Wawancara dengan Satker Perum Bulog Sub Divre Karawang. pada tanggal 1 september 2016, pukul 13.05 WIB

⁸ 8 wawancara dengan Korlap Kabupaten Karawang, Perum Bulog Sub Divre Karawang, pada tanggal 2 september 2016, pukul 10.45 WIB

Selain tantangan permasalahan di lapangan dalam penyaluran raskin yang di hadapi Perum Bulog, peran pemerintah daerah juga sangat penting dalam penyaluran raskin untuk dapat sampai ke tangan RTS-PM. Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto meminta pemerintah memberi jaminan bahwa penyaluran beras untuk rakyat miskin (Raskin) bisa tepat sasaran.⁹ *"Kita minta agar pemerintah memberikan jaminan agar raskin bisa sampai ke sasaran. Untuk itu, mekanisme perlu diubah dimana Perum Bulog harus bertanggung jawab penuh untuk mendistribusikan sampai pada RTS. Kalau seperti yang sudah berjalan, Bulog bisa lepas tangan,"* ujar Hermanto.

Menurutnya, secara eksplisit di dalam Pedoman Umum Raskin jelas disebutkan bahwa pemerintah pusat memberikan subsidi pembelian beras yang dilaksanakan oleh Perum Bulog untuk disalurkan sampai titik distribusi (TD). Jadi, ia menambahkan, jelas disini bahwa sebagai operator Perum Bulog tidak langsung menyalurkan kepada RTS tetapi hanya sampai pada titik distribusi dan tidak sampai pada RTS. Menurut dia Perum Bulog memiliki keterbatasan wewenang dan tanggung jawab dalam penyaluran dan distribusi raskin. Hal ini merupakan titik rawan terhadap penyimpangan. Lebih lanjut Hermanto menjelaskan bahwa setelah Raskin sampai ke titik distribusi, maka untuk selanjutnya pemerintah daerah menyampaikan beras tersebut kepada RTS dengan "6 Tepat" (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Waktu, Tepat Harga dan Tepat Administrasi). *"Karena itu pelaksanaan Program Raskin sangat*

⁹ Berita dan Infomasi: Pemerintah Harus Jamin Raskin Tepat Sasaran. diakses di <http://www.bulog.co.id/berita/37/3247/10/3/2012/Pemerintah-Harus-Jamin-Raskin-Tepat-Sasaran.html> pada tanggal 22 september 2016, pukul 19.38

tergantung pada peran pemerintah daerah seperti sosialisasi, pengawasan mutu, angkutan, biaya operasional, dan lain sebagainya," ujarnya.

Permasalahan yang muncul di dalam pelaksanaan penyaluran raskin harus ditanggapi oleh kedua pihak yang bertanggungjawab dalam penyaluran yaitu Perum Bulog dan Pemerintah Daerah. Dalam proses pelaksanaan program khususnya penyaluran raskin, dimana keduanya dituntut untuk bisa saling bersinergi dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan agar keduanya bekerja melaksanakan kegiatan program sesuai fungsi dan tugasnya masing-masing demi ketercapaian sasaran program yaitu masyarakat miskin benar-benar bisa merasakan manfaatnya, yakni dapat membeli beras berkualitas baik dengan harga terjangkau.

Data jumlah RTS-PM pada wilayah kerja Perum Bulog Karawang dari tahun 2014, 2015, dan 2016 tidak mengalami perubahan. Dimana jumlah RTS-PM paling banyak berada di Kabupaten Karawang.

**Tabel 1.2 Jumlah RTS-PM di wilayah kerja Perum Bulog Sub Divre
Karawang**

Nama Kabupaten/Kota	Jumlah RTS-PM Raskin 2015
Karawang	161.463
Bekasi	92.293
Kota Bekasi	62.048

Di tiga wilayah ini, terdapat 315.804 RTS-PM yang tersebar di 552 desa sekitar Karawang, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Dari tiga wilayah kerja

Bulog Karawang, jumlah penerima raskin terbanyak berada di Karawang, yakni sebanyak 161.463 RTS-PM.¹⁰ Para penerima raskin itu tersebar di 309 desa sekitar Karawang. Selanjutnya di Kabupaten Bekasi terdapat 92.293 rumah tangga penerima raskin, tersebar di 187 desa sekitar Kabupaten Bekasi. Sedangkan di Kota Bekasi terdapat 62.048 rumah tangga penerima raskin yang berada di 56 desa. "*Penyaluran raskin dimulai sejak Januari hingga Desember 2015 nanti,*" kata Alexander, selaku Kepala Sub Divre Karawang pada saat itu. Ia menyatakan, secara umum penyaluran raskin di tiga wilayah kerja Bulog Karawang berjalan cukup lancar. Hanya diakui, masih terdapat tunggakan-tunggakan pembayaran raskin di beberapa daerah.

Banyaknya jumlah RTS-PM pada Kabupaten Karawang merupakan tantangan bagi pemerintah dan Perum Bulog Sub Divre Karawang untuk bersinergi dalam melakukan pelaksanaan penyaluran raskin. Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Karawang jumlahnya cukup banyak yaitu 30 kecamatan. Kecamatan yang paling banyak memiliki jumlah RTS-PM adalah Kecamatan Karawang Barat dengan jumlah RTS-PM sebanyak 8.946 rumah tangga dan tentunya alokasi pagu paling banyak diantara kecamatan lain yang ada di Kabupaten Karawang yaitu alokasi pagu sebesar 134.190kg.

¹⁰ Berita dan Informasi ; "*Penyaluran Raskin Subdivre Karawang Capai 99 Persen*" diakses di <http://www.bulog.co.id/berita/37/5530/10/10/2015/Penyaluran-Raskin-Subdivre-Karawang-Capai-99-Persen.html>

Tabel 1.3 Jumlah Pagu Raskin di Kecamatan Karawang Barat

No.	Kota/Kabupaten/Desa	Pagu Raskin (SPA)	
		RTS-PM	(kg)
	Kec. Karawang Barat	8.946	134.190
1	Adiarsa Barat	552	8.280
2	Karang Pawitan	1.513	22.695
3	Karawang Kulon	1.062	15.930
4	Mekar Jati	1.661	24.915
5	Nagasari	807	12.105
6	Tanjung Mekar	928	13.920
7	Tanjung Pura	845	12.675
8	Tunggakjati	1.578	23.670

Pada penelitian ini, mengenai pelaksanaan penyaluran raskin, peneliti mengambil satu keluarahan yang ada di Kecamatan Karawang Barat yaitu Kelurahan Adiarsa Barat. Berkaitan dengan permasalahan penyaluran raskin yang di dapat peneliti melalui data sekunder yang dimuat di beberapa media elektronik dan data wawancara langsung dengan pihak Perum Bulog, dimana menunjukkan bahwa proses pelaksanaan penyaluran raskin sangat menentukan keberhasilan program secara keseluruhan di samping proses-proses yang lain. Karena proses tersebut merupakan implementasi langsung dalam menyampaikan beras ke tangan Rumah Tangga Sasaran dari program raskin ini. Dari mulai ketidakakuratan data rumah tangga sasaran, pengecekan kualitas beras yang kurangnya pendampingan dan koordinasi antara Pelaksana Distribusi dari pemerintah dengan Perum Bulog, sarana dan prasana untuk menunjang penyaluran raskin, serta tertundanya pendistribusian raskin pada bulan berikutnya.

Permasalahan raskin mengenai ketidakakuratan data RTS-PM juga ditemukan di kelurahan Adiarsa Barat, dimana jumlah penerima RTS-PM di Kelurahan Adiarsa Barat bertambah menjadi 1738 RTS-PM dimana terjadi penambahan penerima raskin yang cukup besar dari hasil musyawarah kelurahan yang tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Kelurahan Adiarsa Barat. Alasan penambahan jumlah RTS-PM tersebut dijelaskan oleh Lurah, yang mengatakan bahwa :

“Setiap tahun pasti ada penyesuaian jumlah rtm penerima raskin oleh kita melalui muskel, data dari pusat yang 552 itu belum mengcover semua rtm yang ada disini, dikarenakan : 1). tiba-tiba ada kepala keluarga di PHK dari pekerjaannya, mereka itu minta untuk bagian raskin. 2). Dan lagi misal keluarganya tiba-tiba ada yang jatuh sakit sehingga perlu biaya berobat yang besar yang menyebabkan mereka butuh bantuan subsidi beras ini. 3). Jadi, jumlah rtm yg termasuk ke 552 itu berartikan tidak sepenuhnya mereka mendapat 15kg/bulan per-KK, bahwa hasil mukels, 15kg per KK itu harus dibagi rata lagi dengan rtm lain yang saya sebutkan tadi. Mengapa hal ini terjadi? Karena kalau kondisi sosial itu dapat berubah-ubah, tidak pasti, tiba-tiba, ini masalah kebutuhan isi perut, kalau sampai ada yg kelaparan? apalagi penetapan rts-pm dari pusat yang tiap tahunnya tidak ada perubahan yaitu terus menerus 552 KK. Kalau menurut saya sebagai lurah mending tidak usah ada sekalian karena sudah jelas selalu ada ketidakakuratan data rtm, saya juga pusing kan banyak yg pengen dapet raskin, org berada juga ada aja yang minta untuk supaya bagian raskin. Kalau menurut saya mungkin keterbatasan APBN juga ya untuk mensubsidi program raskin ini yang tidak mungkin mengcover seluruh masyarakat miskin di indonesia atau solusinya mungkin bisa dievaluasi kembali raskin

ini sebenarnya untuk siapa? Hanya masyarakat yang termasuk miskin saja? Atau masyarakat yang membutuhkan juga? Karena dilihat dari data pusat juga tidak ada perubahan penetapan pagu dari tahun ke tahun ke kita itu hanya untuk 552 KK.”¹¹

Kejadian mengenai ketidakakuratan data RTS-PM sudah seperti hal yang mutlak terjadi. Beliau sebelumnya telah menjadi lurah sebanyak 2 kali di kelurahan lain, dan mengatakan bahwa penambahan jumlah KK penerima raskin dari hasil musyawarah kelurahan (muskel) selalu bertambah lebih banyak dari penetapan RTS-PM pusat. Hal ini didukung dengan pertanyaan Sekertaris Lurah yang menyatakan bahwa :

“BPS sudah selalu melakukan sensus kesini tiap tahunnya yang itu hasilnya juga dijadikan acuan data penetapan pagu raskin pemerintah pusat dalam menetapkan raskin dengan menyesuaikan APBN. Mungkin adanya keterbatasan APBN yang membuat pemerintah tidak bisa membantu secara optimal. Dan juga misalkan apabila penetapan pagu nasional bertambah, nanti pemerintah juga dong yang disorot karena itu berarti sama saja bisa diartikan program raskin tidak mengurangi jumlah rumah tangga miskin, tetapi malah menambah jumlah sasaran. Ini suatu hal yang bisa dikatakan gembling”¹²

Perum Bulog dan pemerintah sebagai *stakeholders* dalam melaksanakan program raskin ini memiliki peran yang sangat penting dalam menyalurkan raskin

¹¹ hasil wawancara dengan Lurah Adiarsa Barat yaitu Bpk Khaerul Bahri pada tanggal 6 oktober 2016 pukul 11.55

¹² hasil wawancara dengan Sekertaris Kelurahan Bpk. Ifan pada tanggal 6 oktober 2016 pukul 15.02

untuk sampai kepada RTS-PM di wilayah masing-masing dengan 6 Tepat. Dalam Ilmu Administrasi Publik, menurut Dwight Waldo, administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari pada manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.¹³ Maka administrasi publik dapat didefinisikan sebagai suatu proses politik yang meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan dan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah guna untuk mencapai tujuannya.

Berangkat dari fenomena yang terjadi diseperti pelaksanaan program raskin khususnya penyaluran raskin di lapangan, fokus penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan program raskin khususnya penyaluran raskin dari Perum BULOG Sub Divre Karawang sampai ke Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat. Sehingga dapat mengetahui penyebab dari timbulnya permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan yang nantinya dapat menjadi bahan perbaikan dalam proses penyaluran raskin selanjutnya dan untuk melihat hasil dan dampak dari pelaksanaan program pemerintah mengenai ketercapaian tujuan umum Program Raskin.

Menganalisis pelaksanaan program raskin ialah sebagai bentuk penelitian yang dilakukan secara sistematis dan objektif dengan tujuan untuk mengetahui dan menilai hasil dari kegiatan program kebijakan yang telah dilaksanakan. Hasil yang didapat dari menganalisis suatu kebijakan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk keputusan selanjutnya. Selain hasil yang didapat, kita dapat melihat dampak

¹³ Dwight Waldo, *The Study Of Public Administration*, random house inc.1955

dari pelaksanaan program yang telah berjalan dimana dapat sebagai masukan untuk mengantisipasi hal yang diinginkan dan yang tidak diinginkan terjadi dimasa yang akan datang berdasarkan dampak yang dihasilkan dari program tersebut.

Setiap kebijakan dan program pemerintah memiliki indikator keberhasilan dalam pelaksanaannya. Pada program raskin, keberhasilan pelaksanaannya diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6 tepat (6T) yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Mengetahui hasil dan dampak dari suatu kebijakan atau program sangat bergantung pada sistem pelaksanaan yang berjalan, yang mana dalam pelaksanaan penyaluran raskin ini bergantung pada Pemerintah Daerah dan institusi terkait yaitu Perum BULOG sebagai badan operasional dalam hal pendistribusian beras yang dilakukan secara bersinergi dalam mengimplementasikan program tersebut, karena hal ini akan berdampak pada kelancaran pelaksanaan program di lapangan dan ketercapaian 6T tersebut sebagai indikator keberhasilan dalam menyalurkan raskin untuk sampai ke tangan RTS-PM.

Menganalisis pelaksanaan program merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui hasil serta dampak dari sebuah kebijakan. Pada proses pelaksanaan pemberian beras kepada sasaran program dapat memberikan dampak yang cukup berpengaruh bagi ketercapaian tujuan umum program, karena pelaksanaannya yaitu penyaluran raskin merupakan pengimplementasian langsung dari program dan melibatkan sistem birokrasi. Hal tersebut menjadi landasan bagi

peneliti untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan program khususnya pada proses penyaluran raskin, dengan judul penelitian: **“Pelaksanaan Program Raskin (Studi Kasus Penyaluran Raskin di Kelurahan Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang)”**

1.2 Perumusan Masalah

Keberhasilan pelaksanaan program raskin dapat dilihat dari tercapainya tujuan program serta indikator 6 Tepat yang digunakan untuk mengukur sejauh mana penyaluran raskin telah dilakukan sesuai dengan pedoman umum raskin. Dalam menganalisis pelaksanaan program raskin perlu mengumpulkan, menganalisa, dan menafsirkan informasi, kebutuhan, implementasi dan hasil yang dicapai. Untuk menilai pelaksanaan program raskin khususnya penyaluran, peneliti menggunakan teori model evaluasi dari Stufflebeam yaitu CIPP (*context, input, process, product*), untuk melihat keseluruhan komponen yang dilaksanakan dalam penyaluran raskin. Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana *context* dari pelaksanaan program raskin di Kelurahan Adiarsa Barat?
2. Apa saja *input* terhadap pelaksanaan penyaluran raskin di Kelurahan Adiarsa Barat?
3. Bagaimana *procces* pelaksanaan penyaluran raskin di Kelurahan Adiarsa Barat?
4. Apa *product* dari pelaksanaan program raskin khususnya dalam penyaluran raskin di Kelurahan Adiarsa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, berikut ini tujuan penelitian, adalah :

1. Untuk mengetahui *context* pelaksanaan program raskin khususnya pada penyaluran raskin dari Bulog ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat?
2. Untuk mengetahui *input* terhadap pelaksanaan program raskin khususnya penyaluran raskin di Kelurahan Adiarsa Barat?
3. Untuk mengetahui *procces* pelaksanaan penyaluran raskin di Kelurahan Adiarsa Barat?
4. Untuk mengetahui *product* pelaksanaan program raskin khsusnya penyaluran raskin di Kelurahan Adiarsa Barat?

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan agar dapat :

- a) Menjadi referensi serta masukan dalam upaya pengembangan konsep atau kebijakan terutama dalam pemecahan masalah mengenai pelaksanaan penyaluran raskin yang dilaksanakan oleh Perum BULOG dan Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab.
- b) Sebagai penerapan ilmu yang telah dipelajari khususnya dalam bidang administrasi publik.
- c) Sebagai bahan informasi dalam upaya meningkatkan pelaksanaan program RASKIN oleh Perum BULOG Sub Divre Karawang dan Pemerintah

Daerah di Kecamatan Bekasi Utara serta pemerintah-pemerintah terkait dan sebagai referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.